**ABSTRAK**

Fenomena aspek ITE dalam pengikatan hak tanggungan secara elektronik, (HTEL) menyebabkan semua pihak yang ada dalam perjanjian kredit mengetahui aplikasi pengikatannya dalam frame *online,*begitu pula aspek birokrasi perbankan dan ATR /BPN harus telah ter akomodasi dalam perubahan cara berteknomogi. Perubahan tersebut secara doctrinal telah menuai banyak polemic. Khususnya mengenai kedudukan hak tanggungan yang tatacaranya leguslasinya telah berubah menjadi *online, perubahan berakibat hukum adanya* hambatan pelaksanaan parate eksekusi (eksekusi langsung) , kedudukan hukum sertifikat hak tanggungan dalam sistem pembuktian dan pelaksanaan sertifikat hak tanggungan elektronik dalam UUHT

Metode pendekatan dalam membahas permasalahan dalam tesis ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan menelaah konsep penerapan hak tanggungan elektronik yang terkait aspek ITE, dan legalisasi eksisting yang telah termaktub sebelumnya dalam UUHT, Dalam penulisan menspesifikasi penelitian ini dengan secara deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta yang berkaitan dengan (HTEL) dalam sistem perbankan, lembaga penjaminan dalam sistem pertanahan , Setelah seluruh data yang menunjang penulisan tesis ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian

Hambatan pelaksanaan parate eksekusi dalam penerapan HTEL adalah dalam praktik litigasi di persidangan, pihak yang mengajukan alat bukti hak tanggungan elektronik tidak memiliki kepastian hukum,. pelaksanaan HTEL memerlukan aturan amandemen atau perubahan Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.

***ABSTRACT***

*The phenomenon of ITE aspect of electronic mortgage binding, (HT- el) causes that all parties involved a in the credit agreement knowing the binding application is in an online frame, as well as aspects of the banking bureaucracy and ATR / BPN must have been accommodated in changing the method of technology. The change is doctrinal has got a lot of polemic. Particularly regarding the position of mortgage rights whose legal system has changed to online, the changes result in the law of obstacles in implementing parate execution (direct execution), the legal position of the mortgage certificate in the proof system and the implementation of the electronic mortgage certificate in the UUHT*

*The research method in discussing the problems in this thesis is the normative juridical approach method, which studies and examines the concept of implementing electronic security rights related to aspects of ITE, and existing legalization that has been previously contained in the UUHT. In writing, specifying this research is descriptive analytically facts related to (HT-el) in the banking system, guarantee institutions in the land system. After all the data supporting the writing of this thesis are collected, a qualitative analysis is carried out. Qualitative means that the research is carried out by providing a systematic description related to the object of research in the form of a description*

*The obstacle to implementing parate executions in the application of HTEL is in the practice of litigation in court, the party who submits electronic mortgage evidence does not have legal certainty. The implementation of HT-el requires amendments to Law No. 4 of 1996 on mortgage right.*